



EVALUASI REVITALISASI PASAR RAKYAT BUNG KARNO WONOGIRI

¹Hutami Kanthi Shashanty, ²Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

¹hutamishashanty@gmail.com, ²isminurhaeni@gmail.com

ABSTRACT

Nowadays the existence of traditional markets is beginning to be eroded by the existence of modern markets which have a better image in the eyes of the public. Revitalization is carried out by the government as an effort to promote traditional markets. One of the revitalized markets is Bung Karno Wonogiri Market. This study aims to evaluate the revitalization of the Bung Karno Market in Wonogiri Regency in 2017 in terms of input, process, output, and outcomes dimensions based on Bridgman and Davis's policy evaluation theory. The results of the study found that the input for revitalization in the form of human resources was sufficient in quality and quantity, but the revitalization funds were considered insufficient and too late. The revitalization process has been effective and quite efficient, marked by clear targets, repeated socialization, there are revitalization objectives, and monitoring of revitalization. The output dimension has met the target, which is right on target, covering all Bung Karno Market traders, but not all traders are involved in the revitalization. The revitalization output is in the form of changes to facilities that fulfill around 82 percent of facilities in accordance with regional regulations, zoning, additional contract workers, e-retribution, and online markets. The outcome of the revitalization is that the market becomes clean and orderly which has an impact on the surrounding traffic, the turnover of traders has increased, and has decreased due to the Covid-19 pandemic.

Keywords; evaluation, revitalization, traditional market.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan memajukan pasar rakyat. Pasar rakyat atau pasar tradisional adalah sumber ekonomi daerah yang paling penting dan mudah diakses berbagai pihak dalam perekonomian kecil. Permasalahan mendasar pasar tradisional adalah lemahnya pengelolaan dan manajemen BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) pengelola pasar yang membuat perkembangan pasar tradisional menjadi sangat lambat, jika tidak bisa dikatakan stagnan atau bahkan mengalami kemunduran (Anam, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo, et. al. (2017) menyatakan bahwa pasar modern indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi pasar tradisional salah satunya adalah pertumbuhan pasar modern dan toko online. (Putra, et. al., 2021). Selain adanya promo, diskon dan bonus yang menyebabkan banyak pelanggan (konsumen) pasar tradisional berpindah ke pasar modern, harga yang diberikan pasar modern juga terbilang sama atau terjangkau (Zikwan, 2020). Hasil penelitian Nuzuliaty, et. al. (2019) menyatakan bahwa revitalisasi berpengaruh signifikan terhadap daya saing dan daya saing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pedagang.

Revitalisasi, sebagai bentuk dari transformasi, dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk memajukan pasar rakyat. Dalam Nawacita yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan untuk merevitalisasi 5000 pasar rakyat yang ada di Indonesia. Hingga akhir 2019, target pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat sebagai amanat Nawacita telah tercapai 5.287 unit pasar rakyat (Kemendag.go.id). Setelah ditetapkan RPJMN 2020-2024, pasar rakyat tidak menjadi fokus pembangunan lagi, akan tetapi berubah fokus pada peningkatan mutu, yaitu sertifikat SNI pasar rakyat atau pasar tradisional serta manajemen pengelolaannya.

Revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional merupakan upaya mensinergikan sumberdaya yang ada di pasar tradisional secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut (Nida, 2014). Sedangkan Pangestu (2004) menyatakan revitalisasi pasar berarti perubahan pasar secara fisik dan pengelolaannya secara modern yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan pasar dengan menyelaraskan pasar dengan lingkungannya, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Revitalisasi pasar bisa meningkatkan pendapatan, bersemangat dalam melakukan perannya untuk melayani pembeli karena beberapa hal yaitu sarana prasarana yang mendukung, pemeliharaan yang dilakukan oleh pengelola pasar (Sudjilah, 2020).

Revitalisasi pasar merupakan respon terhadap tuntutan perubahan zaman untuk menghadapi pesatnya perkembangan pasar modern, kondisi pasar yang tidak layak serta memenuhi tuntutan konsumen. (Prastyawan & Ibandono, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dalam (Poesoro, 2007)

menyatakan bahwa penyebab utama kalah bersaingnya pasar tradisional dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata karena keberadaan supermarket. Kondisi buruk dari pasar tradisional ini, kemudian dijadikan supermarket sebagai keuntungan. Mereka menciptakan pasar dengan menutup kekurangan dari pasar tradisional. Pada penelitian yang dilakukan di Kota Palembang, masyarakat Palembang pada umumnya masih menyukai kondisi jual beli di pasar tradisional, yaitu gemar melakukan tawar-menawar harga pada saat transaksi ekonomi dan lebih menyukai suasana akrab saat berbelanja di pasar tradisional (Sabatiny & Martini, 2018).

Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan pada pasar tradisional untuk mempertahankan eksistensinya disamping pasar modern tanpa meninggalkan ciri khasnya. Untuk membentuk model ideal penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia maka perlu diambil langkah-langkah yuridis, salah satunya kebijakan untuk revitalisasi (Ariyani, 2019).

Penelitian Kim, et al. (2014) pada beberapa pasar tradisional di Korea menyimpulkan tiga solusi untuk revitalisasi pasar yaitu menarik konsumen muda, mengembangkan ciri khas pasar, dan menerapkan sistem yang canggih. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ujianti & Dewi (2021) menyimpulkan revitalisasi pasar dilakukan untuk mengatur dan menata pasar tradisional menjadi lebih baik, dan yang perlu diperhatikan adalah ciri khas pasar tradisional tidak boleh hilang.

Dalam penelitian yang dilakukan Juliarta & Darsana (2016) pada Pasar Nyanggelan Desa Pakraman Panjer, menghasilkan bahwa program revitalisasi pasar tradisional memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang, jumlah pengunjung, dan pengelolaan pasar. Hasil penelitian Bakhri (2017), untuk peningkatan daya saing pasar tradisional yang terdiri dari beberapa aspek, menunjukkan bahwa prioritas ukuran yang harus diambil pertama adalah dukungan pemerintah daerah (30,46%), diikuti oleh fasilitas dan infrastruktur (22,06%), pengelolaan pasar (18,58%), keuangan (16,67%), dan persediaan barang dagangan memiliki skala prioritas (12,22%).

Program revitalisasi pasar tradisional adalah wujud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1) sampai ayat (3). Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan,

pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna peningkatan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang professional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Pada dasarnya tujuan revitalisasi menurut Hanan dalam Khairuni (2016) yaitu: (a) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota yang memudar atau menurun kualitas lingkungannya; (b) Meningkatkan nilai ekonomis kawasan yang strategis; (c) Merangsang pertumbuhan daerah sekitarnya; (d) Mendorong peningkatan ekonomi lokal dari dunia usaha dan masyarakat; (e) Memperkuat identitas kawasan; dan (f) Mendukung pembentukan citra kota.

Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di eks-Karisidenan Surakarta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 dan 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 5,34%. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Wonogiri menargetkan pertumbuhannya meningkat mencapai 5,44% (joglosemarnews.com). Untuk itu pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil jalan dengan melakukan revitalisasi pasar rakyat. Revitalisasi pasar rakyat tertuang dalam salah satu poin dari Panca Program Bupati Wonogiri yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Wonogiri yaitu *Alus Dalane* (Halus Jalannya), *Sehat Rakyat* (Sehat Rakyatnya), *Pinter Rakyat* (Pintar Rakyatnya), *Apik Pasare* (Bagus Pasarnya), dan *Makmur Petanine* (Makmur Petaninya).

Hal pokok yang membedakan pasar tradisional dan pasar modern adalah manajemen pasar modern lebih baik, interaksi dan transaksi lebih sederhana, serta fasilitas fisik lebih memadai (Ariyanty, 2013). Interaksi dan transaksi di pasar tradisional dikenal lebih intens dengan adanya tawar-menawar barang antar penjual dan pembeli. Pada tahun 2015 jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Wonogiri adalah sebanyak 105 pasar. Dari total keseluruhan pasar di Kabupaten Wonogiri, hanya 26 diantaranya yang berada dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Wonogiri, sedangkan 79 sisanya dikelola oleh pemerintah desa atau kecamatan. Dari 26 pasar yang tersebar di 25 kecamatan, hanya 20% yang kondisinya terbilang baik. (Prakosa & Winarni, 2018). Salah satu pasar yang memiliki kondisi yang buruk adalah Pasar Bung Karno Wonogiri di Kecamatan Baturetno.

Kondisi fisik yang kumuh dan sempit membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Terlebih lagi dengan tidak teratur dan tertata dengan baik, Pasar Bung Karno kerap membuat kemacetan di ruas jalan raya. Untuk itu pada tahun 2017 Pasar Bung Karno menjadi salah satu pasar yang dipilih untuk direvitalisasi.

Setelah selesai direvitalisasi pada tahun 2018, Pasar Bung Karno Wonogiri mendapat juara kedua Kompetisi Pasar Rakyat Jateng dengan juara pertama diraih oleh Pasar Rejosari Surakarta. Komponen penilaian dari kompetisi tersebut yaitu mengenai manajemen pengelolaan pasar, kebersihan pasar, keamanan pasar, kenyamanan pasar, pasar berkeadilan, fasilitas pasar, paguyuban pedagang, konektivitas pasar, peran pasar terhadap perekonomian daerah, peraturan daerah penataan pasar, dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan pasar rakyat. Yang menjadi hal menarik adalah Pasar Bung Karno terletak di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri yang bukan merupakan pusat kota Wonogiri. Sedangkan di pusat kota Wonogiri terdapat Pasar Kota Wonogiri yang dari segi bangunan lebih luas dan mewah serta lebih dikenal oleh masyarakat.

Revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional Bung Karno Wonogiri mengakibatkan adanya perubahan dari semula kotor dan tidak tertata, menjadi lebih bersih dan rapi. Kemacetan lalu lintas yang dulunya diakibatkan oleh aktivitas pasar kini juga sudah membaik.

Revitalisasi merupakan salah satu bentuk transformasi. Untuk itu, revitalisasi menjadi bahasan yang penting karena pada dasarnya revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional bertujuan untuk mempertahankan eksistensi pasar rakyat agar tidak kalah bersaing oleh pasar modern. Istilah pasar rakyat mulai dipopulerkan oleh Marie Eka Pangestu yang saat itu menjadi Menteri Perdagangan karena sebutan pasar tradisional sering diidentikkan dengan hal-hal yang kurang bagus.

Adanya perubahan yang signifikan pada Pasar Bung Karno sebelum dan sesudah revitalisasi menjadi hal menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan model pengembangan pasar rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat transformasi Pasar Bung Karno Wonogiri melalui evaluasi revitalisasi pasar rakyat Bung Karno Wonogiri berdasarkan empat dimensi evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis (dalam Badjuri & Yuwono, 2002).

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif dengan menggambarkan secara rinci bagaimana Revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri dilakukan dilihat dari dimensi input, proses, output, dan outcome. Dimensi input meliputi apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan sudah memadai. Dimensi proses meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Dimensi output meliputi hasil dari kebijakan revitalisasi. Sedangkan dimensi outcome meliputi dampak yang diterima oleh masyarakat.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, khususnya di Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive.

Informan untuk sumber data primer yaitu Kepala Bidang Pasar Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, Kepala Kantor Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri, Perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri, Pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri. Data sekunder penelitian ini antara lain Data Pendapatan Pasar Bung Karno Wonogiri 2016-2018, Data Sarana dan Prasarana Pasar Bung Karno Wonogiri, Data Kepegawaian Kantor Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri. Validitas data dilakukan dengan menggunakan validitas triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disajikan dengan mengacu pada empat dimensi evaluasi kebijakan menurut Bridgman & Davis (dalam Badjuri & Yuwono, 2002) yaitu dimensi *input*, dimensi proses, dimensi *output* dan dimensi *outcome*.

1. *Dimensi Input*

Dimensi input mencakup ketersediaan sumberdaya manusia dan sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia

Revitalisasi Pasar Bung Karno merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri dengan melibatkan beberapa pihak terkait, yaitu pemerintah daerah

Kabupaten Wonogiri, jasa konstruksi yaitu PT. Galatama dan Satriamas Karyatama, serta manajemen konstruksi yaitu PT. Yodya Karya.

Dari pihak pemerintah daerah terdiri dari tim teknis yang dipimpin oleh Bupati Wonogiri, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, serta tokoh masyarakat setempat yaitu Camat Baruretno beserta aparat perwakilan dari Kecamatan Baturetno. Dari pihak pasar melibatkan Pengelola Pasar Bung Karno Wonogiri, Paguyuban Pasar, pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri. Sedangkan dari pihak ketiga melibatkan jasa konstruksi pemenang lelang yaitu PT. Galatama dan PT. Satriamas Karyatama serta untuk jasa pengawasnya yaitu PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno, Dinas KUKM dan Perindag telah menyusun Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan (PTLK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dituangkan pada Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag.

Input kebijakan yang berupa sumber daya manusia sudah mencukupi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dilihat dari segi kualitas, sumber daya manusia yang digunakan merupakan para tenaga ahli yang diambil dari perwakilan SKPD yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah, maka sumber daya lain diambil dari pihak ketiga yang lebih ahli dalam bidangnya masing-masing melalui lelang terbuka yang diselenggarakan pemerintah. Sedangkan dari segi kuantitas, sumber daya manusia juga dinilai sudah cukup.

b. Dana

Dalam prosesnya, dana revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wonogiri tahun 2017 senilai 50 miliar. Akan tetapi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan, maka membutuhkan bantuan dari pihak ketiga untuk membantu penyelenggaraan revitalisasi pembangunan fisik pasar. Pencarian pihak ketiga dilakukan melalui proses lelang terbuka yang kemudian dimenangkan oleh PT. Galatama dan PT. Satriamas Karyatama dengan nilai kontrak sebesar 45.743.600.000. Sumber dana yang digunakan merupakan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Wonogiri dan

Dinas KUKM dan Perindag hanya memiliki tugas sebagai pengelola dana tersebut. Rincian anggaran tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2016.

Akan tetapi dalam prosesnya, terdapat beberapa hal terkait dana yang kemudian menjadi hambatan dalam proses revitalisasi. Yang pertama, keterlambatan dana dari pemerintah yang menyebabkan proses revitalisasi sempat tertunda. Yang kedua, dana yang diberikan oleh pemerintah ternyata belum cukup untuk menyelesaikan proses revitalisasi sehingga pedagang secara mandiri menyelesaikan proses revitalisasi yaitu untuk membuat sekat dan memberi pintu untuk setiap kios.

Input kebijakan yang berupa dana kurang mencukupi. Dana yang diberikan pemerintah belum memadai karena tidak dapat memenuhi proses revitalisasi hingga selesai untuk membuat sekat dan memberi pintu pada kios. Selain itu dana dari pemerintah juga terlambat turun yang mengakibatkan terlambatnya proses pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri.

2. Dimensi Proses

a. Perencanaan Revitalisasi

Pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri merupakan semua proses mulai dari perencanaan sebelum dan kegiatan setelah proses pembangunan Pasar Bung Karno Wonogiri selesai dilaksanakan. Revitalisasi Pasar Bung Karno memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang kurang layak, mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas pasar, dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya para pedagang. Oleh karena itu dapat diketahui sasaran kebijakan revitalisasi yaitu pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri dan Pasar Bung Karno itu sendiri.

Pada pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri diawali dengan diadakannya rapat oleh tim dari pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dipimpin langsung oleh bupati. Selanjutnya, rapat-rapat koordinasi dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali. Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan *Detail Engineering Design* (DED) yang mencakup rencana detail pembangunan Pasar Bung Karno, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), lengkap dengan gambar detail perencanaan pembangunan. Semua kebutuhan administrasi terkait revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri dilengkapi sebelumnya, seperti perijinan, Analisis Dampak Lingkungan juga

dipersiapkan untuk membantu proses perencanaan dalam mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi setelah adanya pembangunan.

Revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno Wonogiri dikomunikasikan dengan pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri dengan cara sosialisasi. Karena banyaknya jumlah pedagang di Pasar tersebut, maka sosialisasi terkait revitalisasi pasar dilakukan secara bertahap.

Sosialisasi yang dilakukan secara bertahap memiliki tujuan untuk mensinergikan kepentingan pemerintah dengan kepentingan pedagang, pemerintah dapat menjalankan programnya dan para pedagang dapat mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Sosialisasi sudah diadakan berkali-kali, dan partisipasi pedagang sangat tinggi ditunjukkan dengan kedatangannya yang lebih dari 100 pedagang. Dalam revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri peran paguyuban pasar sebagai perwakilan dari pedagang juga sangat penting, yaitu untuk melakukan koordinasi antara pemerintah dan para pedagang dan menjadi wadah bagi para pedagang untuk menyampaikan suaranya.

Persiapan lain yang dilakukan sebelum proses revitalisasi adalah dengan dibuatnya pasar darurat sebagai pengganti pasar yang akan direvitalisasi. Pasar darurat dipersiapkan pemerintah agar proses jual beli tetap dapat berjalan seperti biasa. Tempat yang sudah direncanakan pemerintah adalah Lapangan Baturetno yang letaknya tidak jauh dari Pasar Bung Karno. Pasar darurat yang dipersiapkan sudah dibagi berdasarkan zonasi dan los-los seperti pasar pada umumnya ditambah tanah lapangan di paving untuk kenyamanan bersama.

Pembuatan pasar darurat bertujuan agar kegiatan jual beli antar pedagang dan masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli tentu tidak dapat berjalan seperti biasanya karena ada perubahan yang terjadi. Para pedagang menempati los-los baru yang memungkinkan dirinya kehilangan pelanggan lama. Beberapa pedagang juga memilih membayar sewa sementara di rumah-rumah pinggir lapangan karena pada praktiknya berjualan di pasar darurat merubah pendapatan para pedagang menjadi tidak seperti biasanya.

b. Pembangunan Pasar

Tahapan selanjutnya adalah tahap pembangunan pasar. Untuk pelaksanaan revitalisasi sudah diatur oleh dinas pihak pengelola pasar bertindak sebagai pihak pelaksana. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Kepala Pengelola Pasar Bung

Karno Wonogiri melakukan survey sederhana tentang pengelolaan pasar ke pasar lain untuk mengambil kelebihan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Untuk selanjutnya, pembangunan Pasar Bung Karno dilaksanakan oleh pemenang lelang terbuka yaitu PT. Galatama dan PT. Satriamas Karyatama dengan pengawasan dari PT. Yodya Karya sebagai Manajemen Konstruksi (MK) serta panitia yang dibentuk oleh Dinas KUKM dan Perindag.

Dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri, sudah cukup jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab untuk semua yang terlibat dalam proses revitalisasi. Pelaksana kebijakan revitalisasi memiliki wewenang masing-masing seperti yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri.

Dari hasil dokumentasi, pembagian wewenang dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Bung Karno dimuat dalam Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2017 serta Surat Keputusan Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri Nomor 35 Tahun 2017. Wewenang tersebut dibedakan menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Panitia Teknis Lapangan Kegiatan (PTLK), dan Pengelola Pelaksanaan Pekerjaan yang masing-masing personil memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri.

Selain adanya pembagian tugas dan wewenang, dari pihak Pelaksana Pekerjaan Lapangan juga sudah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang harus dilaksanakan oleh pelaksana. *Standard Operating Procedure* (SOP) tersebut dimuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak) untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Baturetno I Nomor 8/PPK-Psr.Baturetno I/V/2017 yang ditetapkan pada tanggal 08 Mei 2017. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas dan *Standard Operating Procedure* (SOP) pembangunan Pasar Bung Karno Wonogiri dapat diselesaikan dalam waktu 210 hari kalender terhitung dari tanggal 9 Mei 2017 sampai 4 Desember 2017 sesuai dengan yang direncanakan.

c. Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Revitalisasi

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan selalu dibarengi dengan adanya hambatan dalam pelaksanaan, baik kecil maupun besar hambatan selalu ada bersamaan dengan jalannya sebuah kebijakan. Revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri memiliki beberapa hambatan dalam prosesnya, yaitu:

- 1) Penolakan pedagang terhadap revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri dikarenakan ada rasa memiliki dan sudah nyaman dengan pasar yang ada dan takut untuk menerima perubahan. Hambatan ini dapat diselesaikan dengan adanya sosialisasi yang berulang-ulang dan dengan memberi pengertian kepada pedagang bahwa revitalisasi Pasar Bung Karno merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pada akhirnya pedagang memiliki kesepahaman yang sama dan dapat menerima adanya revitalisasi.
- 2) Keterlambatan dana dari pemerintah yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri Anggaran Tahun 2017. Dana dari pemerintah sebenarnya sudah disiapkan dan direncanakan. Akan tetapi pencairan dana harus melewati beberapa prosedur sesuai aturan birokrasi. Karena dana dari pemerintah baru turun pada bulan Maret, maka proses revitalisasi juga terhambat. Terlebih, pemerintah hanya memberikan waktu satu tahun untuk pembangunan Pasar Bung Karno. Proses lelang baru diselenggarakan bulan Maret dan proses pembangunan diselenggarakan pada bulan Mei 2017- Desember 2017. Meskipun ada keterlambatan dana, proses pembangunan tepat dapat berjalan sesuai rencana yaitu tidak melebihi tahun selanjutnya.
- 3) Keterbatasan dana untuk revitalisasi menyebabkan pedagang harus menggunakan dana pribadi untuk pembuatan kios. Pemerintah hanya menyediakan petakan kios yang kemudian pedagang dengan mandiri membangun sekat dan memasang *rolling door* dengan dana masing- masing pedagang.

d. Pembagian Zona

Pembagian tempat untuk pedagang dilakukan dengan cara pengundian yang dilakukan oleh para pedagang secara bersama- sama. Dari pihak pemerintah sudah sangat mengupayakan untuk meminimalisasi terjadinya konflik. Proses pembagian kios yang sangat transparan dengan dilakukan oleh pedagang dan untuk pedagang diharapkan tidak memunculkan pemikiran negatif terhadap pemerintah. Peran paguyuban dalam pembagian kios juga dikurangi karena ditakutkan adanya tujuan atau kepentingan pribadi yang diutamakan.

Untuk melihat efektivitas kebijakan digunakan 4 aspek menurut Budiani (dalam Kowaas, 2017) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1) Ketepatan sasaran program

Kebijakan revitalisasi Pasar Bung Karno sudah tepat yaitu para pedagang dan Pasar Bung Karno. Dalam revitalisasi Pasar Bung Karno pedagang dilibatkan dalam sosialisasi dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.

2) Sosialisasi program

Dalam revitalisasi Pasar Bung Karno telah dilakukan sosialisasi berkali-kali dengan melibatkan pihak pedagang sebagai sasaran kebijakan serta pemerintah sebagai penyelenggara.

3) Tujuan program

Revitalisasi Pasar Bung Karno memiliki tujuan yaitu untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang kurang layak, mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan oleh aktivitas pasar, dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya para pedagang. Tujuan ini digunakan untuk menilai kesuaiannya dengan output revitalisasi.

4) Pemantauan Program

Pemerintah sebagai implementator kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap jalannya proses revitalisasi. Oleh karena itu, pemantauan program dilakukan untuk melihat sejauh mana program dilaksanakan. Pemerintah menunjuk beberapa tim yang bertugas untuk memantau dan mengawasi jalannya kebijakan yaitu Pengawas Teknik Lapangan Kegiatan (PTLK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan Manajemen Konstruksi (MK).

Berdasarkan uraian mengenai efektivitas kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa revitalisasi Pasar Bung Karno terbilang efektif karena memenuhi keempat aspek tersebut.

Efisiensi menurut Henry (dalam Wibawa, 1994) merupakan perbandingan antara input atau sumber daya yang digunakan oleh program dengan outputnya atau apa layanan yang diterima oleh kelompok sasaran. Output kebijakan akan dibahas di bawah ini, sehingga untuk efisiensi akan dibahas di bawah.

3. Dimensi Output

a. Perubahan Fisik Pasar

Setelah adanya revitalisasi, tentu saja Pasar Bung Karno mengalami perubahan fisik yang sangat signifikan. Kesan kumuh, kotor, dan semrawut yang biasa menempel pada pasar tradisional tidak nampak lagi setelah selesainya revitalisasi. Bangunan

pasar kini tampak terlihat lebih bersih, rapi karena adanya bangunan baru yang lebih modern. Bangunan pasar yang dahulu hanya memiliki satu lantai, setelah revitalisasi menjadi bangunan dua lantai.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, ketiga narasumber berbeda menyatakan hal yang sejalan yaitu perubahan fisik pasar yang lebih baik, terdapat penambahan fasilitas, serta menjadi lebih bersih, dan lebih tertata.

Pada wawancara yang dilakukan, Kepala Kantor Pengelola Pasar Bung Karno menyatakan belum semua sarana pendukung terdapat di Pasar Bung Karno. Perubahan fasilitas sebelum dan sesudah revitalisasi dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Perubahan fisik pasar memang salah satu perubahan yang paling dapat dirasakan secara nyata karena dapat langsung dilihat pada lokasi penelitian. Berdasarkan hasil observasi pada Pasar Bung Karno setelah revitalisasi, bangunan pasar terlihat lebih modern dari pasar tradisional yang biasanya.

Tabel 1. Sarana Pendukung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014

Sarana Pendukung	Sebelum Revitalisasi	Sesudah Revitalisasi
Kantor pengelola	Ada	Ada
Areal parkir kendaraan	Tidak Ada	Ada
Tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah	Ada	Ada
Sarana air bersih	Ada	Ada
Sanitasi/drainase	Ada	Ada
Tempat ibadah	Tidak Ada	Ada (2 buah)
Toilet umum	Ada (1 buah)	Ada (7 buah)
Pos keamanan	Tidak Ada	Ada
Tempat pengolahan limbah/ instalasi pengeluaran air limbah	Tidak Ada	Tidak Ada
Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran	Tidak Ada	Ada
Penteraan	Tidak Ada	Tidak Ada
Sarana komunikasi	Ada	Ada
Areal bongkar muat dagangan	Ada	Ada
Tempat promosi	Ada	Ada
Instalasi listrik	Ada	Ada
Penerangan umum	Ada	Ada
Fasilitas perbankan	Tidak Ada	Tidak Ada

(Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi)

Tabel 2. Sarana Pendukung Tambahan Pasar Bung Karno Wonogiri

Fasilitas	Sebelum	Sesudah
Papan Pemandu Arah	Tidak Ada	Ada
Ruang Laktasi	Tidak Ada	Ada
Ruang Kesehatan	Tidak Ada	Ada

(Sumber: diolah dari hasil wawancara dan observasi)

Sarana pendukung lainnya juga ditambahkan setelah revitalisasi walaupun belum lengkap seperti yang diatur dalam perda.

b. Perubahan Non Fisik Pasar

Selain perubahan fisik, Pasar Bung Karno juga mengalami beberapa perubahan non fisik yang diakibatkan dengan adanya revitalisasi Pasar Bung Karno. Dalam pengelolaannya Pasar Bung Karno mengalami perubahan yaitu dalam penataan pedagang yang sesuai dengan zona masing- masing. Terdapat zona primer yang berisi kebutuhan sehari- hari dan zona sekunder yang bukan merupakan kebutuhan sehari- hari. Zona primer diletakkan pada lantai dua dan zona sekunder diletakkan pada lantai satu dengan tujuan supaya zona sekunder tetap hidup karena harus dilewati orang- orang yang hendak mencari kebutuhan sehari- hari. Zona primer berisi pedagang barang primer seperti bumbu, kelontong, snack, sayur, hasil bumi, warung makan, daging, dan lain- lain. Sedangkan zona sekunder berisi pedagang barang sekunder seperti pakaian, bolo pecah, sepatu sandal, service elektronik, dan lain- lain.

Kebersihan dan keamanan Pasar Bung Karno juga lebih memadai dikarenakan adanya 15 tambahan tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD. Penambahan tenaga kontrak membuat Pasar Bung Karno semakin lebih baik dalam pengelolaannya karena ada petugas yang memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya. Kesan kumuh, kotor, semrawut, dan tidak aman mulai lebur bersamaan ditingkatkannya kualitas pengelolaan pasar tradisional sehingga menciptakan kenyamanan masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Perubahan pengelolaan Pasar Bung Karno setelah revitalisasi memang dilakukan secara berangsur- angsur. Seperti halnya dalam penarikan retribusi. Sebelum revitalisasi penarikan retribusi menggunakan karcis dan dibayar secara tunai, sedangkan untuk saat ini retribusi Pasar Bung Karno sudah menggunakan e-retribusi atau pembayaran non tunai.

Penggunaan e-retribusi atau non tunai tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses penarikan retribusi dan untuk meminimalkan kebocoran. Pasar Bung Karno terpilih oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadi *pilot project* e-retribusi karena sebelumnya Pasar Bung Karno mendapat juara kedua pengelolaan pasar tradisional terbaik di Jawa Tengah. Setelah proyek ini dianggap berhasil untuk selanjutnya e-retribusi akan di terapkan pada seluruh pasar tradisional di Wonogiri. Pada pelaksanaannya, e-retribusi mengurangi kesalahan- kesalahan dalam perhitungan serta mempercepat pengerjaan karena non tunai dan retribusi otomatis terpotong melalui satu kali gesek kartu.

Perubahan non fisik lainnya yaitu terjadi beberapa saat setelah revitalisasi, yaitu akibat dari adanya pandemi Covid-19. Aktivitas jual-beli sempat menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya inovasi pasar online. Jadi, walaupun kegiatan jual- beli sempat terhalang dengan adanya pandemi Covid-19, untuk saat ini sudah dapat terbantu dengan adanya pasar online. Pasar online ini menggunakan aplikasi bernama Kami Satu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, belum terlalu banyak variasi pedagang yang mendaftarkan diri pada aplikasi Kami Satu. Pedagang yang terdapat di aplikasi Kami Satu adalah pedagang bahan- bahan pokok seperti buah, tembakau, kelontong, snack, dan oleh- oleh.

Terdapat empat dimensi output menurut Nurcholis (2005) yang digunakan untuk menilai output revitalisasi yaitu tepat sasaran atau tidak, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, dan seberapa besar kelompok atau sasaran yang terlibat. Sasaran dari kebijakan revitalisasi adalah seluruh pedagang Pasar Bung Karno Wonogiri dan Pasar Bung Karno Wonogiri. Selama revitalisasi berlangsung pedagang sudah banyak dilibatkan seperti dalam sosialisasi untuk memberi informasi kepada pedagang dan menyampaikan pendapat dari pedagang. Jadi untuk sasaran kebijakan sudah tepat.

Sasaran yang tercakup maupun yang tertangani dalam revitalisasi Pasar Bung Karno mau tidak mau tetap seluruh pedagang Pasar Bung Karno karena dalam revitalisasi pasar bukan berkaitan dengan mau atau tidak akan tetapi merupakan keputusan bersama mayoritas pedagang. Jadi seluruh pedagang Pasar Bung Karno mau tidak mau tetap merasakan hasil dan dampak dari revitalisasi pasar. Tidak semua pedagang terlibat dalam revitalisasi Pasar Bung Karno beberapa pedagang hanya

mengikuti keputusan yang telah disepakati oleh pemerintah dan beberapa pedagang yang terlibat dalam sosialisasi revitalisasi Pasar Bung Karno.

4. Dimensi Outcome

a. Dampak Positif

1. Pasar menjadi Bersih dan Rapi

Salah satu dampak revitalisasi Pasar Bung Karno Wonogiri adalah hilangnya kesan kumuh, kotor, dan semrawut yang merupakan akibat dari perubahan bangunan dan pengelolaan pasar. Berdasarkan hasil observasi, Pasar Bung Karno memang terlihat bersih dan rapi. Tidak ada kesan kumuh dan becek seperti pasar tradisional yang sebelumnya.

Tempat parkir yang berada di pinggir jalan raya tentu sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang berlalu- lalang melewati area pasar. Setelah revitalisasi, Pasar Bung Karno memiliki lahan parkir yang luas di dalam area pasar sehingga tidak lagi mengganggu lalu lintas jalan di sekitar Pasar Bung Karno.

2. Omset Pedagang Meningkat

Sejak awal revitalisasi peningkatan omset pedagang menjadi salah satu hal yang diharapkan karena berkaitan dengan kesejahteraan pedagang. Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi, pendapatan pedagang mengalami peningkatan setelah beberapa waktu dari revitalisasi. Beberapa pernyataan narasumber menyampaikan bahwa adanya perubahan dari pendapatan pedagang. Setelah revitalisasi terdapat penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya pengunjung. Hal tersebut memang normal terjadi pada pasar- pasar pasca revitalisasi. Kenaikan pendapatan pedagang sudah diperkirakan untuk dampak jangka panjang setelah revitalisasi. Akan tetapi, dua tahun setelah revitalisasi muncul pandemi di Indonesia. Oleh karena itu pendapatan kembali menurun.

3. Pendapatan Pasar Meningkat

Sumber pendapatan pasar tradisional adalah retribusi pasar. Pasar Bung Karno Wonogiri setelah revitalisasi mengalami peningkatan pendapatan.

Pendapatan Pasar Bung Karno memang fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2018, yaitu satu tahun setelah revitalisasi, pendapatan Pasar Bung Karno mengalami peningkatan yang cukup drastis hingga menyentuh angka 711.100.500.

4. Pengunjung Meningkat

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa pengunjung terasa lebih banyak terlebih ketika adanya hari libur kerja. Pengunjung Pasar Bung Karno setelah revitalisasi menjadi bervariasi, tidak hanya ibu-ibu akan tetapi anak muda dan banyak juga pengunjung laki-laki khususnya ketika ada hari libur kerja.

b. Dampak Negatif

1) Kesalahan pada Drainase Mengakibatkan Banjir

Kesalahan dalam pembangunan drainase menyebabkan timbulnya genangan air di ruas jalan ketika hujan turun. Adanya dampak dari pembangunan drainase baru, menyebabkan munculnya genangan air. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sehingga setelah dikomunikasikan permasalahan genangan air ketika turun hujan sudah dapat diatasi.

2) Saluran Pembuangan Air Tersumbat

Dalam pengaturan zonasi ternyata membawa salah satu dampak negative yaitu tersumbatnya saluran pembuangan air. Lantai atas merupakan tempat untuk zona primer yang termasuk di dalamnya adalah rumah makan. Sisa-sisa makanan yang berasal dari rumah makan tersebut ternyata membuat saluran pembuangan air dari atas ke bawah menjadi sering tersumbat. Setelah dibicarakan bersama, los untuk rumah makan dan daging dibuatkan saluran air tersendiri supaya tidak mengganggu lainnya karena sisa-sisa makanan yang terbawa air cucian dapat menyumbat saluran air.

3) Kios menjadi Sempit

Selain pasar menjadi bersih, nyaman, dan teratur, terdapat dampak negatif dari pembangunan Pasar Bung Karno Wonogiri yaitu kios yang dulunya luas sekarang menjadi sempit meskipun lebih tertata rapi.

Terdapat tiga aspek dalam dimensi outcomes menurut Nurcholis (2005) yaitu ada atau tidak perubahan pada target sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, dan yang ketiga seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah revitalisasi tentu saja membawa perubahan. Perubahan yang terjadi juga cukup besar dan cukup signifikan sesuai dengan tujuan awal revitalisasi. Pasar yang dulunya becek dan kumuh kini sudah terlihat lebih bersih dan tertata yang berdampak pula pada kemacetan yang dahulu disebabkan oleh aktivitas pasar.

Efisiensi dilihat dari input, process, output, dan outcomes, terbilang cukup efisien karena usaha yang dilakukan sebanding dengan hasil beserta dampaknya. Sumber daya yang dimanfaatkan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang bisa dirasakan oleh pedagang bahkan masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno di Kabupaten Wonogiri telah berlangsung dengan dukungan input kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, dan dana revitalisasi yang masih kurang mencukupi. Meskipun proses revitalisasi Pasar Tradisional Bung Karno menghadapi beberapa hambatan, namun revitalisasi Pasar Bung Karno terbilang efektif dan efisien. Proses revitalisasi pasar dikatakan efektif karena sudah memenuhi empat aspek efektivitas yaitu terdapat sasaran program, terdapat sosialisasi program, terdapat tujuan program, dan terdapat pemantauan program. Revitalisasi Pasar Bung Karno juga terbilang efisien karena dengan sebuah kebijakan membawa beberapa dampak baik seperti perubahan fisik pasar, meningkatnya pendapatan pasar, meningkatnya omset pedagang, hingga mengatasi kemacetan arus lalu lintas.

Hasil output revitalisasi pasar antara lain terjadi perubahan fisik maupun perubahan non fisik. Perubahan fisik berupa penambahan dan perbaikan fasilitas pasar, sedangkan perubahan non fisik berupa perubahan dalam pengelolaan Pasar Bung Karno, seperti penataan pedagang sesuai zona, penambahan tenaga kontrak, penggunaan e-retribusi, dan pasar online. Pada akhirnya, revitalisasi pasar tradisional Bung Karno berdampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain pasar menjadi bersih dan rapi, kemacetan berkurang, omset pedagang meningkat, pendapatan pasar meningkat dan pengunjung meningkat. Sedangkan dampak negatif yang muncul adalah kesalahan dalam drainase menyebabkan banjir, saluran pembuangan air tersumbat, dan kios menjadi sempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Chairul. (2014). Analisis Revitalisasi Pasar Tanjung Dalam Rangka Penguatan Pedagang Pasar di Era Bisnis Modern. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 7(1).
- Arianto, Aris. (2018, March 22). Pertumbuhan Ekonomi Wonogiri Terendah se-Surakarta, Pemerintah Akhirnya Pilih Cara Ini. *Retrieved from*

<https://joglosemarnews.com/2018/03/pertumbuhan-ekonomi-wonogiri-terendah-se-surakarta-pemerintah-akhirnya-pilih-cara-ini/>

- Ariyani, Nita. (2019). Penataan Pasar- pasar Tradisional Di Indonesia Berdasarkan Teori “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2).
- Badjuri, Abdulkahar, & Yuwono, Teguh. (2002). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bakhri, Syaeful. (2017). Strategy for Increasing Traditional Market Competitiveness in Dealing with the Presence of Modern Market. *Eko-Regional*, 12(1), 9-17.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). [Mendag: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Berkomitmen Revitalisasi Pasar Rakyat](https://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=8243). Retrieved from <https://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v=8243>
- Juliarta, I Made Guna, & Darsana, Ida Bagus. (2016). Analisis Efektivitas Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang. *E-Jurnal EP Unud*, 5(1), 138-166.
- Khairuni, Zhilli Izzadati. (2016). Revitalisasi Kawasan Wisata Kota Medan sebagai Upaya Meningkatkan Nilai Sosial dan Budaya: Studi Kasus Kawasan Pagaruyung Kota Medan. *Jurnal ArchiGreen*, 3(5), 42-47.
- Kim, Jiyeon, Lee, Minkweon, & Yeom, Minsun. (2014). Revitalization of the Gil-Dong Traditional Market in Korea. *Journal of Marketing Thought*, 1(2): 58-68. Doi: 10.15577/jmt.2014.01.02.58
- Kowaas, A.S., Pioh, N., & Kumayas, N. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Nida, Mufna Mubdiatun. (2014). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(2), 166- 174.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Nuzuliati, Lumbanraja, Gultom, & Rini. (2019). The Effect of Traditional Market Revitalization in Medan City on Competitiveness, Trader Satisfaction and Increases in Sales of Traders with Perceived Value as a Mediation Variable. *EBIC 2019*, 457-465. doi: 10.5220/0009216204570465
- Pangestu, Mari. (2004). Pasar Tradisional yang Modern dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional. www.usdrpindonesia.org/files/downloadCategory/72.pdf

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar.

[Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah \(RPJMD\).](#)

Poesoro, Adri. (2007). Pasar Tradisional di Era Persaingan Global. SMERU. Nomor 22 April-Juni. Halaman 3-10

Prabowo, Edhy, Madi, Sulis, Safri, & Lustrilanang, Pius. (2017). Existence and Revitalization of Traditional Markets against Modern Markets. *Development. Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 7(1), 1-16.

Prakosa, Jantanu Budi, & Winarni, F. (2018). Revitalisasi Pasar Bung Karno di Kecamatan Baturetno Wonogiri. *E-journal Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara*.

Prastyawan, A, & Isbandono, P. (2018). The Role of Local Governments in Traditional Market Revitalization. *Journal of Physics: Conference Series*, 1-6. doi :10.1088/1742-6596/953/1/012164

Putra, I Putu Deny Adistanaya, Mahendrawati, Ni Luh Made, & Suryani, Luh Putu. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 429-434. doi <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3453.429-434>

Sabatiny, Sabrina, & Martini, Rita. (2018). Perkembangan Pasar Tradisional dan Keberadaan Pasar Modern di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya*, 7(1).

Sudjilah. (2020). Revitalisasi Pasar Rakyat dan Dampaknya terhadap Kepuasan dan Pendapatan Pedagang. *Akademika*, 18(2).

Ujjanti, Ni Made Puspasutari & Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. (2021). Traditional Market Revitalization in the Perspective of Cultural Tourism Development in Denpasar City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 605.

Zikwan, M. (2020). Dampak Perkembangan Pasar Modern Di Lingkungan Pasar Tradisional Di Mimbo Situbondo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 180-196. doi: <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.357> (Anam, 2014) (Abdulkahar & Teguh, 2002)